

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ADOPSI MOOC DI PERGURUAN TINGGI

Oleh :

Widyat Nurcahyo
widyatnurcahyo@jagakarsa.ac.id

ABSTRAK

Beberapa tahun sejak dimulainya MOOC pertama kali, kini gelombang MOOC telah menginvasi pendidikan tinggi. Ratusan ribu siswa telah mengikuti MOOC di seluruh dunia. Jutaan dollar telah dihabiskan dalam hibah riset MOOC. Pejabat pemerintah berlomba-lomba mengajukan MOOC sebagai upaya memotong dana pendidikan. Sementara entitas komersial berusaha memonetisasi MOOC. Yang pasti gelombang tsunami MOOC telah sampai pula ke Indonesia. Apakah pendidikan tinggi di Indonesia siap menghadapinya? Artikel ini mengkaji kesiapan Indonesia melalui kajian kualitatif, dengan memandang kesiapan aktor-aktor pendidikan yaitu: kesiapan kebijakan, pengajar, peserta didik, dan *course*. Hasil kajian menemukan bahwa: (1) kebijakan pemerintah Indonesia sebagai payung hukum pelaksanaan MOOC sudah cukup baik; (2) masih banyak pengajar yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sehubungan dengan pedagogi baru dan modernisasi metode pembelajaran; (3) perlu peningkatan literasi digital peserta didik agar kesenjangan antara wilayah kota (pulau Jawa) dengan wilayah lain semakin menipis; dan (4) perlu pembenahan kebijakan mengenai akreditasi MOOC dan skema pendanaan bagi siswa tidak mampu.

Kata kunci: MOOC, Pendidikan Tinggi, Indonesia

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 secara disruptif memaksa perubahan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Institute For The Future (IFTF) memberikan beberapa sinyal pergeseran dalam pendidikan 4.0, yaitu: (Institute for the Future, 2013)

1. Dari pembelajaran episodik menjadi kontinyu
Peluang pembelajaran tertanam di setiap aktifitas. Pembelajaran dimungkinkan dilakukan dimana saja setiap saat.
2. Dari menugaskan menjadi menarik dengan konten
Dengan sumber informasi dan pengetahuan yang tersebar di mana-mana, tantangan bagi para pendidik bergeser dari menyampaikan sumber belajar menjadi menarik peserta didik untuk mengambil bagian dalam semua sumber belajar yang mereka miliki.

3. Dari penyampai konten menjadi kurator konten
Kurator adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mencari, menguatkan, dan menyampaikan informasi dan sumber belajar pada waktu yang tepat dan dalam konteks yang tepat.
4. Dari bekerja pada satu skala menjadi semua skala
Seseorang dapat menangani banyak sekali peserta didik dengan pembelajaran yang sangat personal.
5. Dari ukuran gelar menjadi reputasi
Gelar menjadi tidak penting. Reputasi dan kinerja masa lalu yang menjadi indikator kompetensi seseorang.
6. Dari mengukur nilai peringkat menjadi mekanisme umpan balik kontinyu
Memberikan umpan balik tentang kinerja dan mengukur tingkat penguasaan pelajar daripada menetapkan nilai.

7. Dari ruang kuliah menjadi ruang kolaborasi
Kelas berubah fungsi menjadi ruang kolaborasi. Termasuk ruang kolaborasi alternatif.

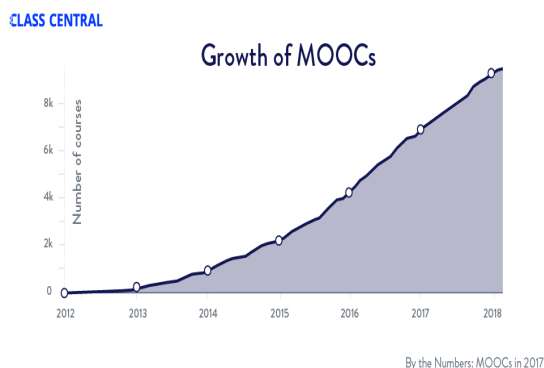
Faktor disruptif yang menyusul kemudian adalah munculnya pandemi Covid-19. Menurut data WHO sebanyak 216 negara terdampak Covid-19, dengan 11.635.939 orang terinfeksi dan 539.026 orang meninggal (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>, diakses 9 Juli 2020). Salah satu sektor yang dipaksa untuk berubah adalah sektor pendidikan. Menurut data UNESCO, per tanggal 7 Juli 2020, sebanyak 1.067.590.512 pelajar dari 110 negara terkena dampak akibat penutupan sekolah (<https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>, diakses 9 Juli 2020). Pembelajaran online yang sudah ada sejak lama namun belum dimanfaatkan secara maksimal, sekarang semua guru, dosen, siswa, mahasiswa, maupun pihak institusi pendidikan, mau tidak mau harus melaksanakannya. Berbagai permasalahan pun terjadi. Tidak hanya permasalahan karena faktor eksternal seperti tidak adanya akses ke internet, *bandwidth* yang tidak mencukupi, biaya yang meningkat, ketersediaan infrastruktur, hingga masalah insentif. Namun juga permasalahan yang terjadi karena faktor internal seperti waktu yang tersita lebih banyak, masalah psikologis akibat *lock-down*, kurangnya literasi teknologi informasi dan komunikasi, serta kurangnya kemampuan merancang pembelajaran online dan membuat media pembelajaran online (World Bank, 2020).

Untuk mengatasinya, maka bentuk pembelajaran yang dibutuhkan adalah **pembelajaran ubiquitous, sosial, dan global**. **Pembelajaran ubiquitous** berasal dari elemen *ubiquitous computing*, dimana pemanfaatan komputer dalam kehidupan manusia tanpa menginterupsi jalannya kehidupan sehari-hari (Peña-Ayala & Cárdenas, 2016). Dengan kata lain, pembelajaran *ubiquitous* adalah pembelajaran kapan saja, dimana saja, di setiap aktifitas kehidupan pelajar

sehari-hari. **Pembelajaran sosial** dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang melampaui individu yang terjadi dalam unit sosial yang lebih luas atau komunitas praktik melalui interaksi sosial dalam jejaring sosial (Reed et al., 2010). Sementara **pembelajaran global** dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran saat beragam orang secara kolaboratif menganalisis dan mengatasi masalah kompleks dengan melampaui batas-batas dunia (Landorf & Doscher, 2015).

Salah satu model pembelajaran yang dapat memenuhi ketiganya adalah model *Massive Open Online Course* (MOOC). MOOC bersifat terbuka, oleh karena itu dapat dilakukan secara global. MOOC memanfaatkan teknologi terbaru dalam e-learning, karenanya dapat dilakukan secara ubiquitous. Di berbagai MOOC yang ada, juga dibentuk atau terbentuk komunitas pembelajar, karenanya bersifat sosial.

Gelombang MOOC di dunia ditandai dengan dibukanya kuliah online oleh Stanford pada tahun 2011 untuk tiga mata kuliah yang diikuti oleh 160 ribu siswa dari seluruh dunia. Enam tahun kemudian, class-central (Shah, 2018) melaporkan perkembangan MOOC di dunia pada tahun 2017, sebanyak 81 juta siswa mengikuti 9400 mata kuliah yang ditawarkan oleh lebih dari 800 universitas di seluruh dunia. Lima penyelenggara MOOC terbesar adalah: (1) Coursera, 30 juta siswa; (2) edX, 14 juta siswa; (3) XuetangX, 9,3 juta siswa; (4) Udacity, 8 juta siswa; dan (5) FutureLearn, 7,1 juta siswa. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan melalui MOOC tiap tahunnya meningkat secara eksponensial, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.



Gambar 1. Peningkatan jumlah mata kuliah MOOC Sumber: (Shah, 2018)

Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi MOOC dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi pada tahun 2014, yang dinamakan Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT). Kini PDITT telah menjadi terbuka dengan nama Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA Indonesia). SPADA Indonesia telah dilaksanakan oleh 51 Perguruan Tinggi penyelenggara dan 116 Perguruan Tinggi mitra dengan jumlah mahasiswa 6.927 siswa. SPADA Indonesia sampai dengan tahun 2017 ini telah menawarkan 253 mata kuliah daring (online courses), 143 mata kuliah terbuka (open courses), dan 172 materi terbuka (open content) (Belmawa, 2018).

Selain pemerintah, beberapa perguruan tinggi terkemuka, pihak swasta dan komunitas juga mengembangkan MOOC masing-masing. Seperti IndonesiaX (dengan platform MITx), MOOCs Universitas Terbuka, CodeSaya (Digital Ocean), Dicoding (Dicoding Indonesia), MOOC-SEAMOLEC, dan lainnya. IndonesiaX sebagai penyedia layanan MOOC terbesar mengaku memiliki siswa teregistrasi sebanyak 154.792 orang sejak dibukanya hingga April 2018, dengan kelulusan hanya 8,29%.

Sekalipun Indonesia termasuk cepat dalam mengadopsi MOOC, namun pada kenyataannya perkembangan jumlah peserta didik tidak secepat perkembangan di dunia. Mengapa hal ini terjadi? Apakah masyarakat Indonesia siap belajar melalui MOOC? Apakah pendidikan tinggi di

Indonesia siap menerima terpaan gelombang dahsyat MOOC dari luar? Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam artikel ini.

DEFINISI MOOC

Selama 20 tahun terakhir, pendidikan tinggi telah mengalami transformasi besar, yang disebabkan oleh: (i) meningkatnya internasionalisasi dan mobilitas siswa; (ii) permintaan yang terus meningkat untuk pendidikan tinggi berkualitas dan pembelajaran seumur hidup; (iii) mengubah demografi siswa; (iv) munculnya pembelajaran online dan terpadu, (v) pendidikan lintas batas dan (vi) pengakuan dan jaminan kualitas kualifikasi dalam dunia digital tanpa batas (United Nations Educational, 2016). Pada saat yang sama, akses ke Internet dan layanan broadband meningkat pesat. Pertumbuhan besar dalam konektivitas seluler juga telah membawa konten dan interaksi online ke khalayak global.

Namun, terlepas dari kemajuan besar yang telah dicapai, akses, kesetaraan dan kualitas tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi pendidikan tinggi dan pembuat kebijakan di berbagai negara dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Peningkatan jumlah siswa didorong oleh permintaan besar untuk pendidikan tinggi, bersama dengan meningkatnya biaya pendidikan dan berkurangnya anggaran publik, memiliki dampak negatif pada kualitas.

Tuntutan pada institusi pendidikan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan program mereka dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk dunia kerja dan pembelajaran seumur hidup, dalam menanggapi pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat, ditambah meningkatnya ekspektasi siswa dalam pasar global yang semakin kompetitif, semua berdampak pada kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran saat ini. Munculnya teknologi baru, yang dimungkinkan oleh Internet, telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru dan cara-cara baru bagi para siswa untuk mengakses pendidikan kapan saja, di mana saja, dengan biaya yang lebih rendah, bahkan memungkinkan mereka memperoleh penghasilan sambil belajar.

Munculnya MOOC dianggap oleh banyak pihak sebagai alat penting untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi jutaan orang, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

MOOC melahirkan banyak kontroversi mengenai kontribusinya dalam pendidikan, dan menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir di kalangan para pendidik, perguruan tinggi, pemerintah dan perusahaan swasta.

Kamus Oxford mendefinisikan MOOC sebagai: *“A course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people”*

(<https://en.oxforddictionaries.com/definition/mooc>, diakses 10/21/2018).

Mulder & Jansen (2015) menjelaskan bahwa MOOC adalah kuliah online yang dirancang untuk peserta dalam jumlah besar, yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet, terbuka untuk semua orang tanpa kualifikasi masuk, dan menawarkan pengalaman pembelajaran penuh / lengkap secara online tanpa biaya (Mulder & Jansen, 2015).

OpenUpEd (2015) menjabarkan lebih detail definisi MOOC berdasarkan kata-kata yang membentuknya, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria berbagai dimensi dari definisi MOOC

		Dimensi	Kriteria
M	Massive	Sebuah kursus online yang dirancang untuk jumlah peserta yang besar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta lebih besar dari pada sebuah kelas di kampus (>150 = Dunbar’s number) - Model pedagogis kursus sedemikian rupa sehingga upaya semua layanan (termasuk staf akademik pada bimbingan belajar, tes, dll.) tidak meningkat secara signifikan karena jumlah peserta meningkat.
O	Open	Kursus dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, selama memiliki koneksi internet.	<ul style="list-style-type: none"> - Kursus bisa diakses oleh (hampir) semua orang tanpa keterbatasan. - Setidaknya konten kursus selalu dapat diakses - Kursus dapat diakses dimanapun selama memiliki koneksi internet
		Terbuka dalam arti kebebasan tempat, waktu dan kecepatan belajar	Kecepatan belajar yang telah ditentukan dan tanggal mulai dan selesai yang tetap, tidak bisa dianggap kriteria eksplisit yang membedakan antara MOOC dan jenis kursus lain.
		Terbuka kepada semua orang tanpa kualifikasi awal tertentu.	Tidak ada kualifikasi / diploma yang dibutuhkan untuk mengikuti kursus online.
		Kursus dapat diselesaikan dengan gratis	Peserta dapat mengikuti kursus secara penuh tanpa biaya
O	Online	Kursus online sepenuhnya	Seluruh aspek kursus dilakukan secara online
C	Course	Satuan pembelajaran	Jumlah waktu belajar MOOC minimal 1 ECTS (umumnya antara 1 dan 4 ECTS)
		Kursus menawarkan pengalaman belajar lengkap termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. konten pendidikan 2. fasilitasi interaksi antar rekan (termasuk interaksi terbatas dengan staf akademik) 3. kegiatan / tugas, tes, termasuk umpan balik 4. semacam opsi pengakuan (non formal) 5. panduan belajar / silabus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten pendidikan dapat mencakup Video - Audio - Teks - Permainan (termasuk simulasi) - Media Sosial - Animasi 2. Menawarkan kemungkinan untuk berinteraksi, seperti saluran media sosial, forum, blog atau pembaca RSS untuk membangun komunitas belajar 3. Peserta diberikan mekanisme umpan balik. Dapat dihasilkan secara otomatis (mis., Kuis), umpan balik oleh rekan dan / atau umpan balik umum dari staf akademik, dll.

			<ol style="list-style-type: none">4. Selalu menyertakan semacam pengakuan seperti lencana atau sertifikat penyelesaian. Sertifikat formal bersifat opsional dan kemungkinan besar berbayar.5. Panduan belajar / silabus termasuk instruksi tentang bagaimana peserta dapat belajar dari materi yang disajikan dan interaksi.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: (OpenupEd, 2015)

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam lima tahap, yaitu (1) menentukan tujuan penelitian, (2) menentukan metodologi, (3) pengumpulan data, (4) analisis data, dan (5) menarik kesimpulan.

Data yang dikumpulkan terdiri dokumen publikasi ilmiah dan kebijakan pemerintah, hasil wawancara dan observasi. Publikasi ilmiah diperoleh menggunakan mesin pencari perpustakaan (<http://e-resources.perpusnas.go.id>) dan Google Scholar, dengan kata kunci "MOOC" atau "Massive Open Online Course". Pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2015-2019. Dari hasil pencarian ditemukan 31 publikasi ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumen kebijakan pemerintah ditemukan dengan mesin pencari biasa, dan ditemukan 3 kebijakan pemerintah yang terkait pembahasan. Wawancara dilakukan kepada 10 orang responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang pernah mengikuti kursus MOOC. Pertanyaan terbuka yang diajukan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kursus MOOC di perguruan tinggi. Observasi dilakukan atas berbagai MOOC yang ada di Indonesia, dengan cara mendaftar sebagai peserta dan mencoba langsung pembelajarannya.

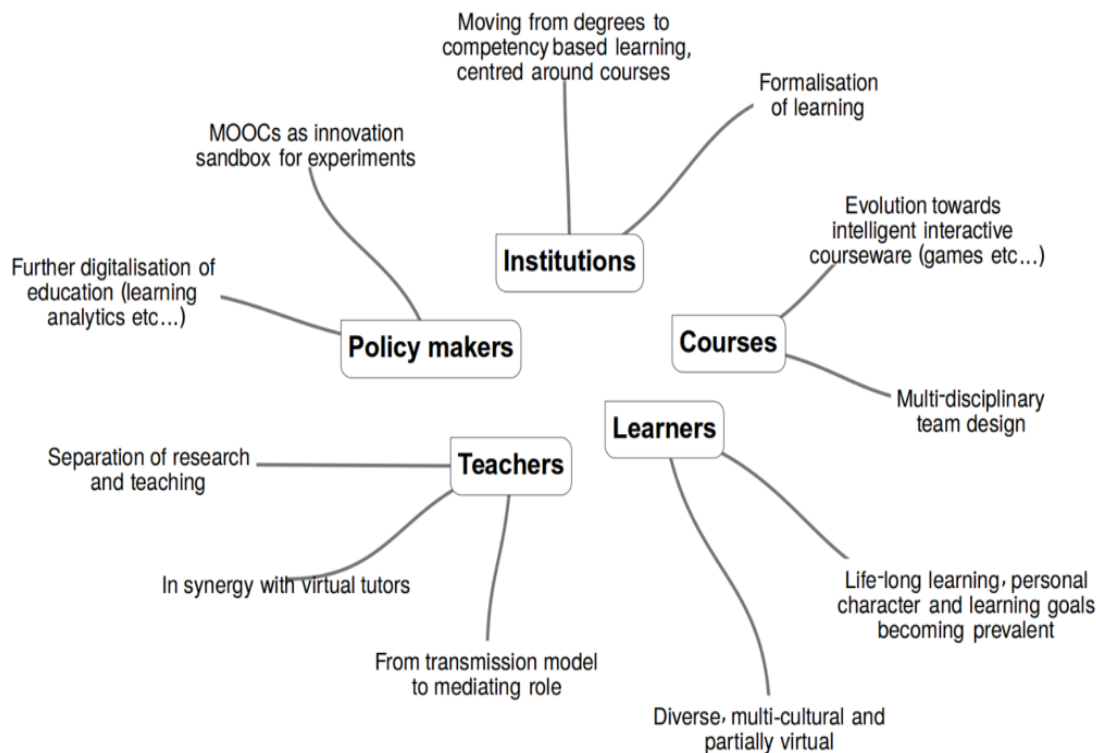
Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kursus MOOC di perguruan tinggi dari data yang dikumpulkan. Informasi tersebut kemudian dianalisis, dikelompokkan dan disajikan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah dikumpulkan, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kursus MOOC di perguruan tinggi, dan mengelompokkannya menjadi 5 faktor, yaitu:

1. Kesiapan kebijakan,
2. Kesiapan institusi perguruan tinggi,
3. Kesiapan pengajar,
4. Kesiapan peserta didik, dan
5. Kesiapan kursus.

Kelima faktor yang mempengaruhi keberhasilan MOOC di perguruan tinggi sebagaimana diperoleh dari analisis data penelitian, ternyata sesuai dengan Loeckx, J. (2016) yang merangkum perubahan yang (mungkin) terjadi pada setiap aktor dalam ekosistem pendidikan akibat MOOC, seperti tergambar dalam diagram di bawah ini (Loeckx, 2016).



Gambar 2. Potensi perubahan akibat MOOC Sumber: (Loeckx, 2016)

Selanjutnya dibahas masing-masing faktor secara detail, dengan urutan: kesiapan kebijakan, institusi perguruan tinggi, pengajar, peserta didik, dan kursus.

Kesiapan Kebijakan

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31 Ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hal ini dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan MOOC di Indonesia.

Khusus bagi pendidikan tinggi, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan PJJ yang termaktub dalam Pasal 31 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai penjabaran pasal tersebut, penyelenggaraan PJJ

pada pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud No. 109 Tahun 2013.

Penyelenggaraan MOOC di perguruan tinggi, baik diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan penyedia MOOC lain, telah didukung oleh kebijakan dalam Permendikbud No. 109 Tahun 2013 yang mengakui tiga modus penyelenggaraan PJJ, yaitu: modus tunggal, ganda dan konsorsium. Modus tunggal bila pembelajaran dalam mata kuliah atau program studi sepenuhnya dilaksanakan dalam bentuk PJJ. Modus ganda bila dilakukan secara campuran antara tatap muka dan PJJ. Dan konsorsium bila dalam bentuk kerja sama antar program studi atau antar perguruan tinggi.

Sifat terbuka MOOC dinaungi pula dalam pasal 3 Permendikbud No. 109 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa bersifat terbuka merupakan pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pemilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur pendidikan, tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang studi, masa

registrasi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi hasil belajar. Sayangnya dalam peraturan yang sama, pada Pasal 11 ayat 1, peserta didik dibatasi paling rendah harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.

Masalah pembiayaan MOOC yang notabene gratis, telah terkandung dalam pasal 10 Permendikbud No. 109 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pembiayaan diatur dan ditentukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Sifat online MOOC juga telah disebutkan sebagai salah satu karakteristik PJJ dalam pasal 3 ayat 1 huruf a.

Dengan begitu hanya sifat *massive* dari MOOC yang belum dinaungi oleh peraturan perundangan yang ada.

Kesiapan Institusi Perguruan Tinggi

Masalah pertama sehubungan dengan hal ini adalah transfer MOOC ke kredit. Berbagai perguruan tinggi di Amerika telah mengupayakan agar hal ini bisa terwujud, namun pada kenyataannya sangat sulit (Kelly, 2014). Hal ini disebabkan karena sedikitnya peserta didik pengguna MOOC yang tertarik untuk mentransfer hasil MOOCnya sebagai kredit kuliah. Ternyata sebagian besar pengguna MOOC telah memiliki gelar dan menggunakan MOOC untuk meningkatkan pekerjaannya atau untuk mencari pekerjaan baru.

Di Indonesia, tampaknya perguruan tinggi penyedia MOOC masih belum bisa keluar dari *mainstreamnya*, yaitu menyediakan layanan bagi mahasiswanya sendiri. Hal ini terlihat dari *course* yang ditawarkan sebagian besar masih mata kuliah umum dan belum menyediakan *course* untuk keterampilan khusus yang berguna dalam pekerjaan. Justru beberapa MOOC *niche* dari pihak swasta dan komunitas yang terlihat telah menyediakannya, walaupun dalam jumlah yang tidak banyak.

Masalah kedua adalah persyaratan penyelenggaraan yang diatur dalam Permendikbud No. 109 Tahun 2013 Pasal 8. Salah satunya adalah kewajiban mempunyai unit

sumber belajar jarak jauh (USBJJ) yang disyaratkan memiliki fasilitas memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik. Aturan ini akan membatasi penyelenggaraan MOOC dan dukungannya tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara online.

Masalah ketiga adalah infrastruktur jaringan. Untuk dapat menjalankan MOOC secara maksimal, tentunya dibutuhkan akses internet yang memadai didukung oleh infrastruktur yang kuat. The Inclusive Internet Index melakukan ranking Internet terhadap 100 negara didasarkan pada empat kategori: availability, affordability, relevance dan readiness. Secara keseluruhan Indonesia menempati posisi 63, jauh dibawah Malaysia di peringkat 34. Skor terendah Indonesia adalah pada kategori *readiness*. Kategori ini mengukur kapasitas untuk mengakses Internet dari tiga indikator, yaitu: literasi, kepercayaan dan keamanan, serta kebijakan (Economist Intelligence Unit Limited, 2019). Selain itu, tingkat penetrasi Internet tidak merata di seluruh daerah, begitu juga dengan kecepatan aksesnya (Berliyanto & Santoso, 2018). Ini membuat institusi harus berpikir ulang untuk menjalankan MOOC di Indonesia.

Kesiapan Pengajar

MOOC dapat merubah kebutuhan atas pengajar, yaitu: (1) menjadi mediator; (2) menguasai multi-domain; (3) mampu bersinergi dengan tutor virtual (Loeckx, 2016). Bahkan dengan meningkatnya penggunaan video, maka pengajar pun dituntut untuk berperan sebagai aktor pendidikan (Perrotta et al., 2016).

Dalam laporan OECD untuk ADB tentang pendidikan di Indonesia (OECD & ADB, 2015), dinyatakan bahwa bagi pendidikan tinggi di Indonesia, pedagogi baru menjadi tantangan yang sangat besar bagi pengajar, termasuk pengajar senior. Metode pengajaran tradisional terus digunakan secara luas. Dikatakan juga bahwa dosen dan manajemen institusi perlu memiliki fokus yang jelas terhadap kebutuhan modernisasi metode dan konten pembelajaran.

Kesiapan Peserta Didik

Hambatan utama bagi peserta didik dalam menerima MOOC adalah *literasi digital*. Kemendikbud memaknai literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari (Nasrullah et al., 2017). UNESCO juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa komponen terpenting dari literasi digital adalah: mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara individu atau kolaboratif dalam lingkungan jaringan, didukung komputer, dan berbasis web untuk pembelajaran, kerja, atau rekreasi (Karpati, 2011). Berbagai penelitian menemukan fakta bahwa tingkat literasi digital di Indonesia masih rendah, tidak merata di seluruh daerah, dan kesenjangan digital tinggi (Berliyanto & Santoso, 2018)(Kurnia & Astuti, 2017)(Rahmah, 2015)(Puspitasari & Ishii, 2016). Penerapan MOOC akan semakin memperlebar kesenjangan antara penduduk yang tinggal di kota dan di daerah terpencil. Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan literasi digital di daerah terutama luar pulau Jawa, serta pemanfaatan e-learning terarah dan terbatas yang difokuskan pada wilayah tertentu untuk mengurangi kesenjangan.

Kesiapan Kursus

Masalah kunci dari kuliah MOOC adalah pengakuan, sertifikasi, dan akreditasi (Read et al., 2018). Tanpa adanya ketiga hal ini, pengaruh jangka panjang MOOC dalam pendidikan tinggi akan sangat terbatas. Apakah pengguna lulusan mau mengakui keahlian yang diperoleh dari MOOC untuk pekerjaan mereka? Tentunya hal ini harus dijawab melalui kredibilitas pendidikan melalui MOOC. Umumnya kredibilitas pendidikan diukur dari akreditasi. Untuk itu, perlu peran serta pemerintah dan berbagai lembaga profesi untuk membuat skema akreditasi

yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya dunia kerja. Selain itu, satu hal yang umumnya membutuhkan biaya saat mengikuti MOOC adalah sertifikasi. Dana ini dibutuhkan penyedia layanan MOOC untuk beroperasi. Hal ini menjadi masalah karena berpotensi meningkatkan kesenjangan pendidikan antara si kaya dan si miskin.

KESIMPULAN

MOOC memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar MOOC bisa berjalan dengan efektif efisien seperti yang diharapkan. Kebijakan pemerintah Indonesia sebagai payung hukum pelaksanaan MOOC sudah cukup baik. Yang perlu dibenahi adalah kebijakan mengenai akreditasi MOOC dan skema pendanaan bagi siswa tidak mampu. Masih banyak pengajar yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sehubungan dengan pedagogi baru dan modernisasi metode pembelajaran, agar siap menghadapi gelo

DAFTAR PUSTAKA

- Belmawa. (2018). *Berita MOOCs Forum for Network Development*. <https://kuliahdaring.ristekdikti.go.id/berita/berita-moocs-forum-for-network-development>
- Berliyanto, & Santoso, H. B. (2018). Indonesian Perspective on Massive Open Online Courses: Opportunities and Challenges. *Journal of Educators Online*, 15(1). <https://doi.org/10.9743/JEO2018.15.1.11>
- Economist Intelligence Unit Limited. (2019). *Availability rankings - The Inclusive Internet Index*. <https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance?category=availability>
- Institute for the Future. (2013). *IFTF: From Educational Institutions to Learning Flows*

Map.

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1580-IFTF_Future_of_Learning_01.pdf

Karpati, A. (2011). Digital literacy in education. In *IITE Policy brief* (Issue May).

Kelly, A. P. (2014). *Disruptor , Distracter , or What ?* (Issue May).

Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran Dan Mitra Yang Dilakukan Oleh Japeli. *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*, 47(2), 149–166. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079>

Landorf, H., & Doscher, S. P. (2015). *Defining Global Learning at Florida International University | Association of American Colleges & Universities*. Diversity and Democracy Vol. 18, No. 3. <https://www.aacu.org/diversitydemocracy/2015/summer/landorf>

Loeckx, J. (2016). Blurring Boundaries in Education : Context and Impact of MOOCs Socio-Economical Context. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 17(3), 92–121.

Mulder, F., & Jansen, D. (2015). MOOCs for opening up education and the OpenupEd initiative. *MOOCs and Open Education Around the World, 2020*(December 2015), 130–142. <https://doi.org/10.4324/9781315751108>

Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

OECD, & ADB. (2015). Education in Indonesia: Rising to the Challenge. In *Far Eastern Survey* (Vol. 20, Issue 15). <https://doi.org/10.1525/as.1951.20.15.01p0699q>

OpenupEd. (2015). Definition Massive Open Online Courses (MOOCs) Version 1.1. In *OpenupEd* (Issue March). https://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf http://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf

Peña-Ayala, A., & Cárdenas, L. (2016). A Revision of the Literature Concerned with Mobile, Ubiquitous, and Pervasive Learning: A Survey. In A. Peña-Ayala (Ed.), *Mobile, Ubiquitous, and Pervasive Learning: Fundaments, Applications, and Trends* (pp. 55–100). Springer International Publishing AG.

Perrotta, C., Czerniewicz, L., & Beetham, H. (2016). The rise of the video-recorder teacher: the sociomaterial construction of an educational actor. *British Journal of Sociology of Education*, 37(8), 1251–1267. <https://doi.org/10.1080/01425692.2015.1044068>

Puspitasari, L., & Ishii, K. (2016). Digital divides and mobile Internet in Indonesia: Impact of smartphones. *Telematics and Informatics*, 33(2), 472–483. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.11.001>

Rahmah, A. (2015). Digital Literacy Learning System for Indonesian Citizen. *Procedia Computer Science*, 72, 94–101. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.109>

Read, T., Barcena, E., & Sedano, B. (2018). Current Trends in MOOC Research and Applications. In D. Jansen & L. Konings (Eds.), *The 2018 OpenupEd Trend Report on MOOCs* (pp. 10–14). EADTU. <https://tinyurl.com/2018OpenupEdtrendreport>

eed, M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I., Glass, J., Laing, A., Newig, J., Parrish, B., Prell, C., Raymond, C., & Stringer, L. C. (2010). What is social learning? *Ecology and Society*, 15(4).

<https://doi.org/10.5751/ES-03564-1504r01>

Shah, D. (2018). *By The Numbers: MOOCS in 2017 — Class Central*.
<https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2017/>

United Nations Educational, S. and C. O. (UNESCO). (2016). *Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers Making Sense of* (M. Patru & V. Balaji (eds.)). UNESCO and Commonwealth of Learning.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002451/245122E.pdf>

World Bank. (2020). *The Covid-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses*.